BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pensiun di Indonesia dewasa ini semakin mendapat perhatian khusus, karena pembayaran pensiun di Indonesia dinilai cukup memberatkan beban negara dengan jumlah yang semakin lama semakin meningkat. Namun, di sisi lain, nominal yang diterima para pensiunan sangat kecil dibandingkan dengan penghasilan pada saat pegawai masih aktif bekerja dan tidak menjamin kesejahteraan pensiunan. Masa pensiun merupakan saat final dalam rangkaian pengabdian berpuluh-puluh tahun bagi seorang pegawai negeri sipil (PNS). Jika setelah pensiun, kesejahteraan seorang pensiunan tidak berbeda jauh dengan ketika masih aktif mengabdi, tentunya tidak akan timbul masalah. Namun, kenyataan yang terjadi adalah nominal pensiun hanya mencapai 80% dari gaji pokok, atau tidak mencapai 50% dari total hasil pendapatan ketika masih aktif menjadi pegawai. Perhitungan potongan pensiun yang dibebankan kepada pegawai dihitung dari besaran gaji pokok yang diterima, sedangkan pegawai, selain menerima gaji pokok, juga terbiasa menerima tunjangan yang nominalnya lebih besar dari gajinya, sehingga perhitungan yang kurang tepat ini menimbulkan nominal pensiun yang diterima akan jauh lebih kecil daripada ketika masa aktif bekerja.

Makna jaminan hari tua yang terkait dengan nilai besaran manfaat yang diterima nanti tentu berbeda dengan nilai uang saat ini, karena nilai inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dunia terus berfluktuasi. Iuran yang dibayarkan pegawai pada saat ini tentu nilainya akan jauh berkurang apabila dibayarkan 20 tahun yang akan datang ketika pegawai memasuki masa pensiun. Nominal yang diterima sangat kurang apabila harus disesuaikan dengan biaya hidup yang tinggi, sementara usia pegawai telah memasuki masa yang kurang produktif.

Untuk mengatasi masalah pensiun yang kompleks tersebut, dalam sebuah seminar nasional bertema " Grand Design Pensiun: Reformasi Sistem Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Indonesia (Tantangan dan Solusi)" yang diadakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta pada tanggal 13 Desember 2012, telah dibahas mengenai rumitnya mengubah sistem pensiun PNS dari sistem *pay as you go* menjadi sistem *fully funded*. Sistem *pay as you go* yang selama ini diterapkan adalah sebuah sistem yang membuat beban sangat besar bagi pemerintah, kesalahan pemilihan sistem dimana pemerintah membayar dana pensiun ketika pegawai memasuki usia pensiun ini justru membuat anggaran yang semakin membengkak setiap tahunnya karena jumlah pegawai yang memasuki usia pensiun terus bertambah. Namun apabila pemerintah menjalankan sistem *fully funded* atau sistem pendanaan pensiun yang bersumber dari iuran yang dilakukan secara bersama-sama oleh PNS sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja, maka dana yang terkumpul itulah yang akan menjadi sumber pendanaan bagi PNS yang memasuki usia pensiun.

Selama ini dengan sistem *pay as you go*, PNS dikenakan iuran wajib sebesar sepuluh persen dari gaji pokok yang dialokasikan untuk iuran tabungan hari tua sebesar 3,25%, iuran tabungan pensiun sebesar 4,75% dan iuran asuransi kesehatan sebesar 2%. Jumlah dana pensiun yang kelak diterima akan memiliki gap yang cukup besar dengan standar pendapatan yang biasa diterima saat menjadi pegawai, karena sebagaimana diketahui perhitungan tersebut diambil dari gaji pokok saja sementara pada saat masih aktif menjadi pegawai, PNS juga menerima berbagai tunjangan yang jumlahnya jauh lebih besar dari gaji pokok. Hal ini juga berarti sistem pensiun yang dipilih harus diikuti dengan perbaikan pada sistem dan struktur penggajian pegawai.

Rumitnya proses dan berbagai perubahan sistem yang harus dilaksanakan akan menimbulkan berbagai tarik menarik kepentingan dan memungkinkan adanya gejolak yang akan terjadi di kalangan pegawai, karena itu pemerintah harus memikirkan jalan keluar serta masa transisi yang jelas dan mampu menjelaskan kepada semua *stakeholder* terutama

para pegawai itu sendiri apakah perubahan tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak. Artinya, sistem pensiun yang didesain harus mampu memberikan manfaat dalam rangka menjamin kehidupan di hari tua, dan juga dalam perspektif pemberi kerja, dalam hal ini adalah pemerintah, sistem pensiun tersebut tidak memberatkan beban anggarannya. Proses ini memakan waktu yang tidak sebentar dan masa transisi yang belum dapat ditetapkan.

Dalam persepektif manajamen keuangan, sistem pensiun merupakan salah satu keputusan penempatan dana yang berkaitan dengan alokasi dana investasi. Penerapan sistem *fully funded* menuntut adanya lembaga pengelola dana pensiun yang lebih kuat, kredibel, transparan dan profesional. Pengumpulan dana pensiun pegawai yang berasal dari iuran pegawai dan pemerintah bisa dikelola secara lebih baik, dipadukan dengan kemungkinan dananya melalui investasi agar dana tersebut bisa tumbuh dan berkembang secara signifikan untuk kesejahteraan para pensiun itu sendiri.

Secara umum, dana pensiun adalah semua program, peraturan atau ketentuan yang menjanjikan manfaat pensiun termasuk upaya-upaya penghimpunan dana utuk menyelenggarakan program pensiun dan dana yang berhasil dikumpulkan akan dikelola dengan memperhatikan keamanan dananya serta dapat memberikan return yang optimal. Dengan adanya kesadaran pemerintah mengenai pentingnya upaya pemeliharaan berkesinambungan pada penghasilan hari tua, tidak hanya untuk golongan PNS namun juga untuk masyarakat umum, maka muncullah lembaga-lembaga swasta yang mengelola dana tersebut, yang disebut Dana Pensiun. Dengan adanya Dana Pensiun ini memungkinkan terbentuknya suatu akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan.

Perusahaan Dana Pensiun ini dapat memberikan manfaat pensiun pada anggota pada saat yang bersangkutan memasuki masa pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam

ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun dimana pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.

Dengan munculnya berbagai perusahaan Dana Pensiun di Indonesia yang menawarkan dalam berbagai bentuk aset keuangan, bisa menjadi alternatif bagi para PNS untuk dapat mulai menyiapkan minimnya penghasilan ketika masa pensiun nanti. Tentu saja dalam merencanakan dana pensiun tersebut seseorang akan berhadapan dengan berbagai kebutuhan masa sekarang yang diperhadapkan dengan kebutuhan yang harus disediakan untuk masa depan, yang keduanya memerlukan sejumlah dana finansial. Sumber dana finansial yang dialokasikan dapat berasal dari berbagai tunjangan di luar gaji pokok yang sekarang sudah banyak diterima oleh para PNS, terutama yang telah mendapatkan remunerasi ataupun para dosen berstatus PNS yang telah mendapatkan sertifikasi. Namun tidak mudah untuk menyisihkan uang bagi kepentingan 20-30 tahun ke depan, tergantung dari kemampuan seorang dalam mengendalikan diri.

Studi-studi tentang reformasi sistem pensiun PNS di Indonesia masih relatif sedikit dilakukan lembaga-lembaga penelitian termasuk di instansi pemerintah sendiri. Minimnya studi tentang reformasi sistem pensiun ini merupakan salah satu indikasi rendahnya minat dan perhatian terhadap upaya-upaya perbaikan sistem pensiun PNS, padahal hasil studi tentang pensiun dapat membantu para perumus kebijakan dalam mengambil langkah-langkah mereformasi sistem pensiun PNS.

Namun di Amerika, hal ini menarik perhatian beberapa peneliti dalam melakukan sejumlah penelitian mengenai perilaku peserta pensiun. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Julie Richardson Agnew (2010:577), banyak dipaparkan beberapa penelitian yang menyangkut pemilihan alokasi dana pensiun yang dilakukan oleh pegawai, baik pegawai yang terdaftar pensiun secara otomatis dalam suatu perusahaan, maupun pegawai yang mendaftarkan dirinya secara sukarela dalam program perencanaan dana pensiun.

Di Amerika, pilihan bagi masyarakat tidak hanya terbatas pada pensiun, tetapi juga mulai meluas ke berbagai aspek yang disajikan dalam satu paket yang dapat memberikan

manfaat bagi para pegawai seperti perencanaan dana kesehatan dan program manfaat terencana lainnya. Sedangkan di Indonesia, sudah mulai banyak tersedia program Dana Pensiun yang tergabung dalam satu paket yang dijual oleh kebanyakan perusahaan asuransi. Paket-paket tersebut yang biasa disebut dengan *unit link* biasanya ditawarkan dalam bentuk manfaat asuransi kesehatan disamping dengan menjanjikan imbal hasil dari investasi dana yang dibayarkan. Jenis produk asuransi tersebut dapat menjadi aset keuangan bagi para peserta.

Bodie & Kane (2008:3) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengubah daya beli dari periode berpenghasilan tinggi menjadi periode berpenghasilan rendah adalah dengan "menyimpan" kekayaan dalam bentuk aset keuangan. Aset keuangan memiliki kontribusi terhadap kekayaan individu, dan individu dapat memilih untuk menggunakan kekayaannya untuk hari ini atau melakukan investasi untuk masa depan. Kebalikan dari aset keuangan adalah aset riil, seperti tanah, bangunan dan aset fisik lainnya. Aset riil ini juga digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai instrumen investasi. Kebanyakan masyarakat Indonesia membeli aset riil untuk kemudian jika harganya naik maka akan dijual kembali dan selisih harga beli dengan harga jual dianggap sebagai keuntungan dari investasi tersebut.

Pada klien lingkungan investasi di sektor rumah tangga, keputusan ekonomi dibuat sepanjang waktu, yang melibatkan aktivitas seperti bekerja, mengikuti pelatihan, merencanakan pensiun, serta menabung dan konsumsi. Sebagian besar rumah tangga memiliki ketertarikan pada beragam jenis aset, dan jenis aset yang menarik berbeda tergantung dari situasi ekonomi suatu rumah tangga. Bahkan pertimbangan pajak dan preferensi yang terbatas dapat mengarah pada berbagai permintaan atas aset yang berbeda. Selain itu, pertimbangan risiko juga menimbulkan permintaan untuk alternatif kumpulan investasi yang berbeda. Pada tingkat tertentu, perbedaan toleransi risiko menciptakan permintaan aset dengan beragam kombinasi risiko-tingkat imbal hasil.

Pada dasarnya, semua aset baik aset keuangan maupun aset riil memiliki risiko. Aset keuangan seperti saham dan obligasi memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan aset riil. Namun aset keuangan juga memiliki imbal hasil yang lebih tinggi. Motivasi risiko juga mengarah pada permintaan sarana dimana investor dapat dengan mudah mendiversifikasi portofolionya dalam aset keuangan dan mengimbangi kemungkinan risiko mereka. Lalu bagaimana menentukan apakah individu akan lebih memilih risiko besar atau tidak dalam perilaku investasinya terutama dalam mengelola asetnya untuk kelangsungan daya belinya ketika memasuki masa pensiun, sementara sektor rumah tangga begitu kompleks akan berbagai kepentingan keputusan ekonomi.

Teori ini dikenal dengan nama *behavioral finance* dimana premis dari keuangan keperilakuan ini adalah bahwa teori keuangan konvensional mengabaikan bagaimana sebenarnya manusia mengambil keputusan dan bahwa setiap orang membuat keputusan yang berbeda (Bodie & Kane, 2008:511). Selanjutnya Bodie & Kane (2008:511) menjelaskan bahwa ketidakrasionalan individu dalam membuat keputusan berasal dari dua premis utama, yaitu kesalahan dalam memproses informasi sehingga membuat kesimpulan yang salah tentang distribusi probabilitas imbal hasil masa depan serta pada distribusi probabilitas tertentu individu sering membuat keputusan yang tidak konsisten atau membuat keputusan yang secara sistematis tidak optimal.

Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti hubungan antara kepribadian dengan perilaku para peserta pensiun, yang berkaitan dengan investasi atau pemilihan alokasi dana pensiun pada suatu kelompok masyarakat Indonesia yang mempunyai profesi tertentu. Kelompok masyarakat yang dipilih adalah kelompok pegawai negeri sipil, yang sesuai dengan pemaparan sebelumnya akan mengalami masa pensiun dimana periode pendapatan akan lebih kecil daripada pengeluaran. Dari kedua penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu oleh Silooy (2012) dan Haning (2012), *mental accounting* berpengaruh baik terhadap perilaku hedonis maupun perilaku yang lebih positif dalam mengatur keuangan, serta penelitian yang dilakukan oleh Choi et al bahwa bias perilaku

mental accounting terdapat pada peserta pensiun yang tidak memilih alokasi dana sesuai dengan keinginan mereka.

Subjek penelitian yang dipilih adalah para pegawai negeri sipil di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STP Bandung), yaitu merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pegawai negeri sipil STP Bandung terdiri dari dosen dan karyawan, dimana dosen yang telah memenuhi syarat sertifikasi telah menerima penghasilan tambahan berupa tunjangan sertifikasi dosen yang nominalnya satu kali gaji yang diterima setiap bulannya. Tambahan penghasilan ini dapat menjadi alasan bagi para dosen untuk menempatkan sebagian dananya sebagian kelebihan penghasilannya untuk periode pensiun, dimana pendapatan akan lebih kecil daripada pengeluaran. Penulis juga akan membandingkan secara deskriptif mengenai perilaku investasi antara dosen dan pegawai non dosen, karena pegawai non dosen memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dan telah menerima remunerasi sebagai tambahan pengahsilannya. Selain itu, para dosen yang diharapkan memiliki pengetahuan lebih baik dalam bidang keuangan akan lebih menyadari kurangnya dana pensiun yang secara otomatis dibayarkan melalui potongan, serta menambah alokasi dananya secara sukarela melalui instrumen investasi jangka panjang.

Sikap dalam menerima tambahan penghasilan tentu akan berbeda-beda antar individu, oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaitkannya dengan kepribadian seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Mayfield (2008). Apakah perbedaan kepribadian antar individu akan mempengaruhi *mental accounting* seseorang dan apakah kepribadian dan *mental accounting* tersebut juga ada pengaruhnya terhadap perilaku investasi peserta pensiun.

Dari pemaparan latar belakang tersebut, penelitian ini penulis beri judul **"Pengaruh Kepribadian dan *Mental Accounting* terhadap Perilaku Keuangan Peserta Pensiun pada Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung"**

B. Identifikasi Masalah

Sistem pensiun di Indonesia pada lingkungan pemerintahan yang masih menggunakan sistem *pay as you go* dinilai sangat memberatkan anggaran pemerintah namun di sisi lain pula tidak menjamin kehidupan yang layak bagi para peserta pensiun setelah mereka memasuki masa pensiun. Masalah ini terus dibahas dan masih akan menemui banyak hambatan untuk mengubah sistem yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik pemberi kerja maupun pegawai. Studi dan penelitian mengenai reformasi sistem pensiun di Indonesia akan sangat membantu para perumus kebijakan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubah sistem tersebut.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Choi et al (2008) dalam Agnew (2010) menunjukkan adanya bias perilaku *mental accounting* pada pegawai yang tidak memilih alokasi dana pensiun yang sesuai dengan mereka. Sedangkan Mayfield (2008) meneliti mengenai tipe investor berdasarkan teori lima kepribadian dasar seseorang.

Dalam penelitian ini penulis ingin menghubungkan model dalam kedua penelitian tersebut untuk meneliti perilaku peserta pensiun terutama dalam menempatkan dananya untuk tujuan jangka panjang yaitu masa pensiun mereka dimana pendapatan akan lebih kecil daripada pengeluaran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dijabarkan persoalan penelitian dalam rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kepribadian, *mental accounting* dan perilaku keuangan peserta pensiun di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung?
2. Bagaimana pengaruh kepribadian terhadap *mental accounting*?
3. Bagaimana pengaruh kepribadian terhadap perilaku keuangan peserta pensiun?
4. Bagaimana pengaruh *mental accounting* terhadap perilaku keuangan peserta pensiun?

5. Bagaimana pengaruh kepribadian dan *mental accounting* terhadap perilaku keuangan peserta pensiun?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis gambaran kepribadian, *mental accounting* dan perilaku keuangan peserta pensiun di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh antara kepribadian terhadap *mental accounting*.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh antara kepribadian terhadap perilaku keuangan peserta pensiun.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh antara *mental accounting* terhadap perilaku keuangan peserta pensiun.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepribadian dan *mental accounting* terhadap perilaku keuangan peserta pensiun.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi dalam mengembangkan ilmu manajemen keuangan terutama pada teori keuangan perilaku. Penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai perilaku keuangan peserta pensiun, bias perilaku *mental accounting* atau kaitan antara kepribadian dan bias perilaku lainnya dalam teori *behavioral finance*.

2. Manfaat praktis

   Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai gambaran bagi para praktisi mengenai perilaku keuangan peserta pensiun berdasarkan teori keuangan perilaku serta kaitannya dengan kepribadian dan *mental accounting*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para *stakeholder* untuk mengambil kebijakan mengenai pensiun, khususnya untuk lingkungan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung